DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PPIDPELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BIREUEN

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2025

NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB	BENTUK INFORMASI			JENIS INFORMASI				RETENSI ARSIP
				ONLINE	CETAK	REKAM	BERKALA	SETIAP SAAT	SERTA MERTA	DIKECUALIKAN	
1	PROFIL DINAS PERHUBUNGAN	Informasi seputar alamat kantor, ruang lingkup kegiatan, struktur organisasi, pejabat, gambaran umum dinas, visi dan misi	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V				V			SELAMA BERLAKU
2	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V	V		V				SELAMA BERLAKU
3	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2025 DAN 2026	Dokumen Pelaksanaan Anggaran digunakan untuk menetapkan sumber pendanaan, besarnya alokasi anggaran, serta menjelaskan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pada Tahun 2025 dan 2026.	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V	V		V				SELAMA BERLAKU
4	RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2025 DAN 2026	Dokumen yang berisi rencana dan estimasi pengeluaran keuangan yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan pada tahun anggaran 2025 dan 2026.	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V	V		V				SELAMA BERLAKU
5	INFORMASI BERKALA DINAS PERHUBUNGAN	Informasi Berkala mengenai Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen, yang mencakup : Alamat kantor, Ruang lingkup kegiatan, tugas dan fungsi serta unit-unit layanan dibawahnya, Struktur Organisasi, Profil singkat Pejabat Struktural, dll	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V				V			SELAMA BERLAKU
6	SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2024	Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dibuat untuk menentukan atau menetaapkan status resmi seseorang dan menjabarkan tugas serta kewajiban di Dinas Perhubungan.	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V	V		V				SELAMA BERLAKU
7	RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2026	Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Perhubungan dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V	V		V				SELAMA BERLAKU
8	LAPORAN KINERJA BADAN PUBLIK (LAKIP)	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu 1 tahun.	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V	V		V				SELAMA BERLAKU
9	LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023	Laporan Keuangan Dinas Perhubungan merupakan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas Perhubungan pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V	V		V				SELAMA BERLAKU

Dipindai dengan CamScanner

10	TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN	Tata Cara Pengaduan merupakan tahapan yang dapat dilakukan untuk melakukanpengaduan terhadap penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN		V			V			SELAMA BERLAKU
11	RENCANA STRATEGIS 2025-2029	Rencana Strategis adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V	V		V				SELAMA BERLAKU
12	PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 67 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BIREUEN	Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V	V		V				SELAMA BERLAKU
13	DATA PERBENDAHARAAN ATAU INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA	Data Perbendaharaan atau Inventaris Barang Milik Negara berisi barang inventaris milik Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V	V		V				SELAMA BERLAKU
14	PROSEDUR EVALUASI BENCANA	Prosedur Peringatan Dini dan Keadaan Darurat adalah Tata Cara dalam mengantisipasi keadaan darurat	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V				V			SELAMA BERLAKU
15	FASILITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BIREUEN	Fasilitas layanan informasi publik Dinas Perhubungan digunakan untuk menunjang pelayanan terhadap informasi publik di Kabupaten Bireuen yang mencakup : Meja, Kursi, Kursi Tunggu	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V				V			SELAMA BERLAKU
16	FASILITAS RUANG KHUSUS LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BIREUEN	Fasilitas ruang khusus layanan informasi publik Dinas Perhubungan digunakan untuk menunjang pelayanan terhadap informasi publik di Kabupaten Bireuen	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V				V			SELAMA BERLAKU
17	TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	Tata Naskah Dinas di lingkungan pemerintah daerah digunakann untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V			V				SELAMA BERLAKU
18	PEDOMAN POLA KARIR PNS DI KABUPATEN BIREUEN	Pedoman ini ditetapkan untuk menjamin kepastian arah pengembangan karir PNS sesuai dengan kompetensi dan prestasi yang dimiliki	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V			V				SELAMA BERLAKU
19	SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V			V				SELAMA BERLAKU
20	FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI	Formulir Permohonan Informasi merupakan data yang harus diisi untuk mengajukan informasi di Dinas Perhubungan	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V				V			SELAMA BERLAKU

Dipindai dengan CamScanner

21	FORMULIR KEBERATAN INFORMASI	Formulir Keberatan Informasi merupakan data yang harus diisi untuk mengajukan keberatan atas informasi di Dinas Perhubungan	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V				V			SELAMA BERLAKU
22	PELAYANAN INFORMASI UNTUK PENYADANG DISABLITAS DAN KEMUDAHAN MEMPEROLEH INFORMASI	Pelayanan ini ditujukan untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam memperoleh informasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V				V			SELAMA BERLAKU
23	PROSEDUR STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN	Pedoman/Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut dengan SOP adalah Pedoman bagi PPID dan PPID Pembantu dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bireuen dalam memberikan Pelayanan Informasi Publik.	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V				V			SELAMA BERLAKU
24	TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI	Tata cara permohonan informasi berisikan mengenai alur/tahapan permohonan informasi publik	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V				V			SELAMA BERLAKU
25	TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAN	Tata cara permohonan keberatan digunakan untuk membuat permohonan keberatan. Berisikan alur rinci yang bertujuan untuk memudahkan penggunanya.	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V				V			SELAMA BERLAKU
26	TATA CARA PENYELESAIN SENGKETA INFORMASI	Tata cara ini berisikan tahapan-tahapan yang rinci dan bertujuan untuk memudahkan penggunanya	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V				V			SELAMA BERLAKU
27	BUKU REGISTRASI PERMOHONAN INFORMASI	Buku Regidtrasi Permohonan Informasi merupakan buku register permohonan informasi publik yang sekurang-kurangnya memuat nama pemohon, alamat pemohon, informasi yang diminta, dan alasan penolakan jika permohonan informasi ditolak	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN		V			V			SELAMA BERLAKU
28	STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BIREUEN	Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2024	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V				V			SELAMA BERLAKU
29	KOORDINASI INTERNAL PPID DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BIREUEN	Koordinasi Internal PPID Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen dilakukan secara rutin di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen yang dihadiri, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Operator	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V			V				SELAMA BERLAKU
30	TUGAS PPID PEMBANTU	Dokumen ini berisi tentang Tugas PPID Pembantu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V			V				SELAMA BERLAKU
31	VISI DAN MISI PPID PEMBANTU	Dokumen ini berisi tentang Visi dan Misi PPID Pembantu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V			V				SELAMA BERLAKU

Dipindai dengan CamScanner

32	SOP PPID PEMBANTU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BIREUEN	Dokumen berisi SOP PPID Pembantu Dinas Perhubungan diantaranya: SOP Permohonan Informasi dan dokumentasi publik, SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik, SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan, SOP Keberatan Informasi Publik, SOP Fasilitasi Sengketa Informasi dan SOP Dokumentasi dan Pengarsipan PPID	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V	V			V			SELAMA BERLAKU
33	STANDAR BIAYA PELAYANAN INFORMASI	Standar Biaya Pelayanan Informasi merupakan ketetapan yang dibuat Dinas Perhubungan mengenai aturan biaya pelayanan informasi	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V	V			V			SELAMA BERLAKU
34	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	Dokumen berisi Daftar Informasi Publik PPID Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V	V			V			SELAMA BERLAKU
35	SOP DINAS PERHUBUNGAN	Dokumen berisi tentang SOP yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen	PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN	V				V			SELAMA BERLAKU

Bireuen, 07 Mei 2026

PLT. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI AB, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 197604082010031001

Dipindai dengan CamScanner